

IMPLEMENTASI PROGRAM SARANA PENGEMBANGAN AIR MINUM DI DESA SUM KECAMATAN OBI TIMUR KABUPATEN HALMAHERA SELATAN

Rinny Patasaka.

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Indonesia

Abstrak

Dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan serta upaya untuk memberii akses yang baik bagi warga masyarakat di perdesaan sehingga dapat memenuhi kebutuhan vital yakni air bersih maka pemerintah membuat program pengadaan sarana air bersih di Desa Sum Kecamatan Obi Timur yang kemudian dikemas dalam sebuah Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri), dimana proses pengerjaan program ini secara langsung melibatkan masyarakat desa setempat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui serta menggambarkan secara gamblang implementasi program dalam hal ini pengadaan sarana air bersih .Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode kualitatif, yaitu akan dipaparkan secara deskriptif implementasi program pengadaan air bersih, apa saja yang menjadi kendala dan hambatannya, sejauhmana pengerjaan programnya berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari 26 orang informan. Data dan informasi tersebut diperoleh melalui tiga instrument penting yakni wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian dapat di ketahui bahwa implementasi program PNPM-Mandiri yang dalam hal ini pengadaan sarana air bersih di Desa Sum belum selesai sehingga warga desa belum bisa menikmati sarana tersebut. Kendala ang dihadapi diantaranya medan yang sulit dalam melakukan penggalian saluran pipa dari lokasi sumber air dengan letak desa, sehingga memperlambat proses pengerjaan. Maka perlu peran aktif pemerintah dalam hal menjadi partner kerja dari para kontraktor agar dapat menawarkan solusi terhadap hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pengerjaan program ini sebab hanya penduduk serta pemerintah setempat yang tahu betul mengenai karakter wilayah desanya.

Kata kunci : Implementasi, Pemberdayaan Masyarakat,

PENDAHULUAN

Program pengadaan sarana air bersih ini dikemas dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM-Mandiri), sehingga dalam proses implementasinya ikut melibatkan warga desa secara langsung sebagai pekerja-pekerja lapangan seperti dalam pemasangan pipa-pipa air sepanjang jalur yang sudah ditetapkan dalam rancangan kerja sebagai area saluran air dari sumber mata air sampai ke rumah warga melibatkan masyarakat desa. Hal ini bertujuan agar warga mulai berdaya dan berupaya dalam meningkatkan taraf hidupnya. Disamping itu juga dengan adanya pemberdayaan ini warga mulai disadarkan untuk merasakan adanya saling memiliki dan menjaga desanya karena warga sendiri yang tau benar apa yang menjadi kebutuhan hidup dan fasilitas yang belum

terpenuhi namun demikian, bukan hanya sampai di situ saja tapi ikut mengawasi.

Berdasarkan observasi dari survei yang di lakukan oleh tim Kontraktor SPAM pada bulan April 2016 pada mata air Morasa dihasilkan data kapasitas sumber air sangat besar yakni : > 10 liter/dt, sedangkan kebutuhan untuk seluruh desa Sum minimal 6 liter/dt. Dipilihnya Desa Sum, sebagai lokasi pembangunan sarana air bersih karena mengingat salah satu kajian awal dari Program Percepatan Pembangunan Sanitasi Permukiman (PPSP) menyatakan bahwa Desa Sum termasuk salah satu dari 13 wilayah di Provinsi Maluku Utara yang beresiko kekurangan air bersih dari sisi kesehatan lingkungan. sarana air bersih dan sanitasi masih kurang memadai yang mengakibatkan akses terhadap air bersih masih rendah. Walaupun masyarakat sebagian besar mempunyai sumur

gali tetapi saat musim kemarau tiba sumur tersebut tidak dapat dipergunakan karena mengering.

Sejak tahun 2012 lalu Pemerintah Desa Sum sudah mengusulkan agar segera di bangun sarana air bersih di Morasa namun baru sejak tahun 2015 usulan tersebut diakomodir oleh pemerintah dan DPR Provinsi. Sehingga mulai di lakukan survei lokasi sumber air pada tahun 2015 dan disepakati bahwa pelaksanaanya dimulai bulan Agustus-Desember 2016.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Implementasi Kebijakan

Menurut Usman (2002) implementasi bermuara pada aktivitas aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Setiawan (2004) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif. Implementasi dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. Implementasi adalah sesuatu yang dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat itu dapat berupa undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan dan kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

2. Konsep Kebijakan Publik

Carl J Federick sebagaimana dikutip (Leo Agustino 2008) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa

yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah.

Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata implementasi bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem. Dalam hubungannya dengan penulisan ini dapat disimpulkan bahwa Implementasi diberi batasan pada kenyataan berlakunya suatu peraturan Perundang-Undangan. Dari beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwa implementasi kebijakan menyangkut tiga hal, yaitu:

1. Adanya tujuan atau sasaran kebijakan
2. Adanya aktivitas/kegiatan pencapaian tujuan
3. Adanya hasil kegiatan
3. Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Rappaport (dalam Anwas 2013), pemberdayaan adalah suatucara denganmana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampumenguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Pemberdayaan tidak sekedar memberikan kewenangan atau kekuasaan kepada pihak yang lemah saja dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses pembangunan dalam meningkatkan harkat dan martabat serta kesejahteraan manusia. Oleh karena itu profesi mulia sebagai agen pemberdayaan perlu ditunjang oleh kompetensi yang mampu memberdayakan masyarakat di era global sekarang ini (Anwas, 2013).

Menurut Prasodjo (2004) mengemukakan beberapa hal mengenai pemberdayaan masyarakat, antara lain :

1. Pemberdayaan pada dasarnya adalah memberi kekuatan kepada pihak yang kurang atau tidak berdaya (powerless) agar dapat memiliki kekuatan yang menjadi modal dasar aktualisasi diri.
2. Pemberdayaan masyarakat tidak hanya menyangkut aspek ekonomi.
3. Pemberdayaan masyarakat agar dapat dilihat sebagai program maupun proses.
4. Pemberdayaan yang sepenuhnya melibatkan partisipasi masyarakat.

5. Konsep pemberdayaan masyarakat mencakup pengertian pembangunan yang bertumpu pada masyarakat dan pembangunan yang bertumpu pada manusia.

Tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Lebih lanjut perlu ditelusuri apa yang sesungguhnya dimaknai sebagai suatu masyarakat yang mandiri. Kemandirian masyarakat adalah merupakan suatu kondisi yang dialami masyarakat yang ditandai oleh kemampuan untuk memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya dan kemampuan yang terdiri atas kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dengan pengerahan sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat tersebut, dengan demikian untuk menuju mandiri perlu dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik dan afektif, dan sumber daya lainnya yang bersifat fisikmaterial (Teguh, 2004).

Menurut Charles O. Jones (1996), pengertian program adalah cara yang di sahkan untuk mencapai tujuan, beberapa karakteristik tertentu yang dapat membantu seseorang untuk mengidentifikasi suatu aktivitas sebagai program atau tidak yaitu:

- a. Program cenderung membutuhkan staf, misalnya untuk melaksanakan atau sebagai pelaku program.
- b. Program biasanya memiliki anggaran tersendiri, program kadang biasanya juga di identifikasikan melalui anggaran.
- c. Program memiliki identitas sendiri, yang bila berjalan secara efektif dapat diakui oleh publik.

Program terbaik di dunia adalah program yang didasarkan pada model teoritis yang jelas, yakni sebelum menentukan masalah sosial yang ingin diatasi dan memulai melakukan intervensi, maka sebelumnya harus ada pemikiran yang serius terhadap bagaimana dan

mengapa masalah itu terjadi dan apa yang menjadi solusi terbaik (Jones, 1996).

Berdasarkan pengertian diatas maka dapat diambil kesimpulan bahwa program adalah suatu cara yang disahkan untuk mencapai suatu tujuan yang memiliki karakteristik yaitu membutuhkan staf, memiliki anggaran sendiri serta memiliki identitas.

Metodologi Penelitian

Untuk membantu dan menunjang penelitian ini, metode yang digunakan penulis yaitu metode kualitatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni data yang digunakan merupakan data kualitatif (data yang tidak terdiri dari angka-angka) melainkan berupa gambaran dan kata-kata.

Sedangkan jenis penelitian ini adalah jenis metode studi kasus (case study), artinya penelitian ini berangkat dari studi kasus di lapangan, yang bertujuan untuk memperoleh data yang relevan, atau suatu penelitian yang dilaksanakan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang, serta interaksi lingkungan suatu unit sosial : individu, kelompok, lembaga atau masyarakat.

Karena riset kualitatif meneliti perilaku dan lingkungan sosial manusia maka dinamakan dengan situasi sosial (social setting). Situasi sosial inilah yang juga mengarahkan peneliti untuk fokus pada penelitiannya.

Untuk itulah, peneliti menetapkan social setting sebagai elemen yang penting karena peneliti bisa dengan mudah menganalisa suatu masalah karena beberapa faktor selain situasi sosial yang tidak terlalu luas dan jarak yang tidak terlalu jauh, juga bisa dengan mudah mendapatkan data atau informasi sesuai dengan judul dan masalah penelitian yang dikumpulkan, karena jarak domisili peneliti cukup dekat dengan lokasi informan sehingga mudah untuk menjangkau informan dalam memperoleh data atau informasi penelitian.

Jenis sumber data yang digunakan peneliti dalam suatu riset yaitu :

- 1) Data primer, data yang dihimpun langsung oleh peneliti, umumnya dari hasil observasi terhadap situasi sosial atau dari tangan pertama atau subjek (informan) melalui proses wawancara. Data ini kita peroleh dari narasumber atau informan yang kita jadikan

objek penelitian atau yang kita jadikan sarana untuk mendapatkan data ataupun informasi, yang dalam ini berupa teks wawancara. Pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah melalui wawancara semiterstruktur, yakni wawancara yang dilakukan secara bebas namun terarah dengan tetap berada pada jalur pokok permasalahan yang akan ditanyakan. Kemudian akan adanya pengembangan pertanyaan sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga dimungkinkan mendapatkan data yang lebih lengkap juga dokumentasi penting lainnya untuk pendukung penelitian.

- 2) Data sekunder, data yang diperoleh melalui sumber tertulis atau dokumentasi. Data sekunder ini diperoleh secara tidak langsung. Pengumpulan data melalui dokumentasi memerlukan seperangkat alat dalam mengambil data dokumentasi, yang akan diseleksi secara langsung mana yang akan diperlukan. Data tersebut dapat kita peroleh di perpustakaan, majalah, buku-buku laporan, instansi, perusahaan atau organisasi yang lain.

Teknik pengumpulan data dalam riset kualitatif yang dilakukan peneliti ini adalah melalui tiga cara, yaitu :

- 1) Observasi Partisipan (Participant Observer), adalah pengamatan berperan serta yang pada dasarnya mengamati dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya.
- 2) Wawancara Mendalam (In-dept Interview), adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai atau informan, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara (interview guidance), dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relatif lama.
- 3) Dokumentasi (Documentation), adalah cara pengumpulan data dengan mempelajari arsip atau dokumen-dokumen, yaitu setiap bahan tertulis baik internal maupun eksternal yang berhubungan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian.

Dalam riset ini, peneliti menggunakan teknik analisa data model Milles dan Huberman yang terdiri atas :

- 1) Reduksi Data (Reduction), yaitu data yang diperoleh, dirangkum, dipilih hal-hal pokok, kemudian dipilah-pilah berdasarkan satuan konsep, tema dan kategori tertentu yang akan memberikan gambaran tentang hasil pengamatan dari peneliti.
- 2) Penyajian Data (Data Display), yaitu data disajikan bisa dalam bentuk uraian kata, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data.
- 3) Kesimpulan dan Verifikasi Data (Verification), yaitu data kualitatif dimulai dari analisa berbagai data yang dikumpulkan dari lapangan, baik melalui data primer maupun sekunder, seperti observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian data tersebut diklasifikasikan ke dalam kategori tertentu dan harus mempertimbangkan kevalidan data dan disusun menjadi kesatuan. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar memudahkan penulis dalam menarik suatu kesimpulan akhir dari penelitian dan juga agar memudahkan alur penelitian ini terarah sesuai dengan fokus penelitian.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Setiawan (2004) berpendapat, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana birokrasi yang efektif. Artinya dari suatu program melibatkan upaya-upaya pembuat kebijakan untuk mempengaruhi perilaku birokrat pelaksana agar bersedia memberikan pelayanan dan mengatur perilaku kelompok sasaran. bermuara pada aktivitas aksi tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

Kenyataan bahwa desa Sum masih kurang tersedianya air bersih untuk dipergunakan oleh warga desa dalam memenuhi kebutuhan hidup setiap hari serta melihat taraf hdiup masyarakat yang masih tergolong kurang mampu, maka

dalam pelaksanaan musyawarah desa dengan membahas agenda perencanaan pembangunan deesa Sum sehingga disepakati untuk mengajukan proposal yang ditujukan kepada Pemerintah Provinsi agar bisa dibangun sarana air bersih yang kemudian dikemas dalam bentuk pemberdayaan masyarakat.

Tahun 2016 program ini mulai dilaksanakan mulai dari tahap survei lokasi yang menjadi sumber mata air yang kemudian akan disalurkan sampai kerumah-rumah warga. Implementasi program ini didanai oleh pemerintah provinsi bekerjasama dengan pihak Nestle melalui program CSV yang sudah menjadi program paten dari perusahaan tersebut dimana bertujuan untuk menjadi mitra pemerintah dalam memenuhi kebutuhan saran adan prasarana di daerah-daerah tertentu yang dinilai maish memprihatinkan serta tidak memenuhi standar kesehatan.

Selaku pihak yang mengerjakan program ini dilapangan adalah kontraktor yang sudah mengikuti tender proyek yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Sedangkan pekerja-pekerjanya adalah para warga masyarakat yang bersedia dan memiliki kemampuan, yang dikoordinir oleh satu orang kader program yang telah ditunjuk. Kader inilah yang mengatur, mengarahkan, mengawasi serta member upah kepada pekerja-pekerja yang bertugas bas dilapangan. Adapun pekerjaan-pekerjaan yang dikerjakan oleh penduduk setempat diantaranya pembangunan bak-bak air, penggalian tana saluran pipa air, pengecoran saluran pipa, pemasangan pipa air, pemasangan meteran keran di rumah-rumah warga desa.

Melihat kenyataan tersebut, pemerintah Desa Sum tidak melakukan koordinasi dengan pihak kontraktor yang menjalankan progyek engerjaan pembangunan sarana air bersih itu. Pemerintan Desa Sum hanya berdiam diri, dan bersikap menunggu boa. Hal ini yang sangat disesalkan oleh masyarakat desa. Sebab pemerintah Desa seharusnya berkoordinasi dengan pihak kontraktor mempertanyakan mengapa pembangunan sarana air bersih tersebut belum juga rampung agar fasilitas tersebut sudah bisa digunakan oleh warga Desa Sum.

Dilain pihak, kontraktor yang mengerjakan proyek tersebut tidak memberikan penjelasan konkrit mengenai alasan pengertjaan proyek terrsebut belum selesai.

Pihak kontraktor terlihat bersikap mau cari aman saja sebab alasan terakhir yang pihaknya sampaikan kepada warga desa yang mempertanyakan masalah tersebut pengerjaan proyeknya belum selesai dengan alasan kondisi alam Desa yang menghambat air tidak bisa mengalir dari mata air hingga ke rumah-rumah warga.

Melihat adanya ketimpangan pengadaan proyek ini, peneliti merasa perlu untuk ditelusuri lebih jauh lagi kepada pihak yang awalnya melakukan survey kelayakan mata air. Pihak yang melakukan survey tersebut menyatakan bahwa sumber air yang ada disana memang layak untuk dikonsumsi dan debit airnya diperkirakan bisa memenuhi kebutuhan air berssih dari seluruh warga Desa Sum.

Tetapi memang kondisi alam sangat menentukan, letak sumber mata air yang sangat jauh dari area Perkampungan Desa Sum, serta kondisi tanah yang datar membuat air akan sulit mengalir dari sumber mata air ke rumah-rumah warga. Dalam kondisi seperti ini nampak bahwa kurang matangnya perencanaan pembangunan yang dimusyawarkan oleh pemerintah desa bersama masyarakat sebab tidak memperhatikan kondisi alam yang ada di Desa Sum.

Namun terlepas dari hambatan tersebut, sisi positif dari pelaksanaan proyek pembangunan sarana air bersih ini adalah pemberdayaan masyarakat desa yang dapat terlaksana, diman pelaksanaan pembangunan ini melibatkan warga desa setempat asalkan memiliki keterampilan di bidang pertukangan (bangunan) seperti dapat membangun bak penampungan air, tau membuat galian tanah untuk meletakkan pipa-pipa air, dapat melakukan pengecoran lubang saluran pipa-pipa air, dapat memasang pipia-pipa air dari lokasi sumber mata air sampai ke rumah-rumah warga.

Masyarakt desa merasa diberdayakan melalui pelaksanaan pembangunan proyek ini. Mereka merasa memiliki pekerjaan dengan upah yang lumayan besar, sehingga dapat

memenuhi kebutuhan sandang, pangan, papan bagi masing-masing keluarganya.

Warga desa mendapat pekerjaan baru karena selama ini hamper seluruh kepala keluarga berprofesi sebagai petani dengan hasil pertanian yang tidak tentu sebab hasil bumi bergantung pada musim.

Kontrol warga Desa Sum sudah terlaksana meskipun belum seluruh warga sadar akan perannya tersebut.

Sampai saat ini proyek pembangunan sarana air bersih di Desa Sum belum selesai dan proses pengerjaannya sudah berhenti. Setelah dilakukan konfirmasi kepada Pemerintah desa, pihaknya mengungkapkan bahwa itu adalah tanggungjawab dari kontraktor pemegang proyek. Setelah dilakukan kroscek kepada pihak kontraktor, pihaknya beralibi bahwa itu adalah tanggungjawab dari Dinas Pekerjaan Umum sebab mereka mengerjakan proyek mengikuti tender yang dibuka secara umum oleh Dinas PU.

Peneliti tidak sampai disitu mengusut problem proyek ini. Kembali dilakukan pengecekan kepada pihak Dinas Pekerjaan Umum dan pernyataan mereka bahwa, itu semua merupakan tanggungjawab dari pihak kontraktr yang sudah menang tender. Sebab kontrak kerja setiap proyek adalah dimulai sejak awal sampai selesainya proyek, karena dana untuk pengerjaan proyek tersebut sudah cair 100%.. Jadi, selesainya proyek pembangunan sarana air bersih di Desa Sum merupakan tanggungjawab penuh oleh kontraktor. Namun Dinas PU selaku pemerintah bertugas membina dan mengarahkan kontraktor tersebut serta mengkoordinasikan dengan pihak terkait agar proyek terseut bisa kembali dikerjakan hingga rampung dan hasilnya bisa dinikmati oleh seluruh warga Desa Suma. Sebab pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah adalah untuk memenuhi semua kebutuhan vital masyarakat yang selama ini masih berkekurangan.

Penutup

Implementasi kebijakan pengembangan Sarana Air Bersih (SAB) ini utamakan berdasarkan dari hasil usul (Musrenbang) Musyawara Perencanaan Pembangunan Desa, kecamatan

dan kabupaten dan didanai langsung Pemerintah Propinsi.

Masyarakat telah merasakan dampak positif dari Program Sarana Air Bersih (SAB), namun secara keseluruhan dalam Implementasi program tersebut masih meninggalkan beberapa kendala yaitu belum selesainya pekerjaan pemasangan pipa air serta uji coba jangkauan pipa-pipa air dari sumber mata air kepemukiman/Rumah warga desa.

Pembangunan Sarana Pengembangan Air Minum (SPAM) turut mengikutsertakan partisipasi masyarakat secara aktif dan bertanggung jawab.

Peleksanaan pekerjaan pemberdayaan Pengembangan Sarana Air Bersih (SPAM) di optimalisasi oleh masyarakat di desa Sum yang ditentukan serta diarahkan oleh kader pembangunan sarana air bersih dan petugas kontraktor

Peran pemerintah desa sangat penting bagi kelangsungan pembangunan desa sum, salah satunya membantu menyusun rencana pembangunan dan memfasilitas musyawara perencanaan pembangunan secara partisipatif.

Pemerintah wajib mengawasi pelaksanaan program Sarana Pengembangan Air Minum (SPAM) oleh kontraktor atau pelaksana proyek. Perlu adanya peningkatan kinerja dari kontraktor Program Sarana Pengembangan Air Minum (SPAM) sehingga dapat di selesaikan sesuai target dalam perencanaan.

Perlu adanya transparansi pelaksanaan Program Sarana Pengembangan Air Minum (SPAM) dari pihak kontraktor dan pemerintah kepada warga desa sehingga dapat membantu penyelesaian hambatan-hambatan dalam program tersebut.

Daftar Pustaka

- Agustino, Leo. (2006). Politik & kebijakan publik AIPI Bandung-puslit KP2W Lemlit Unpad.
- Agustino Leo. 2008. Dasar-dasar Kebijakan Publik. Bandung.
- Anwas, 2103. Pemberdayaan Masyarakat di Era Global. Bandung: Alfabeta.
- Jones, Charles O. 1996. Pengantar Kebijakan Publik. PT. Raja Grafindo Persada
- Prasodjo, 2004. Jurnal Ilmiah Administrasi Publik